

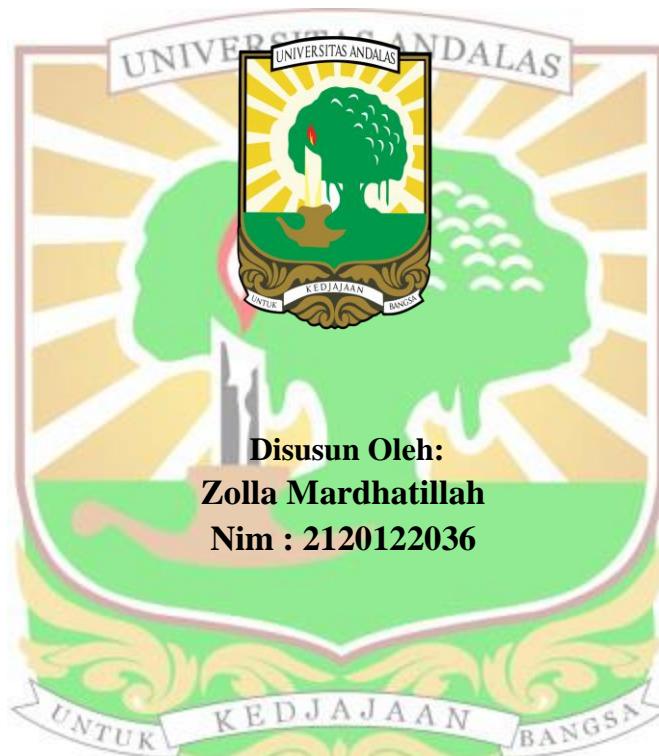
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA KETERANGAN  
HAK WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR**

**43/PDT.G/2020/PN.MEDAN**

**(Studi Putusan Nomor:43/PDT.G/2020/PN.MDN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
memperoleh Gelar magister kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA KETERANGAN  
HAK WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR**

**43/PDT.G/2020/PN.MEDAN**

**(Studi Putusan Nomor:43/PDT.G/2020/PN.MDN)**

Zolla Mardhatillah, 2120122036, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Tahun 2024

**Abstrak**

Pada setiap peralihan harta perkawinan selama perkawinan tidak diperjanjikan perbuatan untuk mengalihkan, menjaminkan harus mendapat persetujuan dari masing-masing pasangan kawinnya sehingga apabila terjadi pengalihan harta bersama dalam perkawinan menyebabkan perbuatan tersebut batal demi hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Akibat Hukum Pembatalan Akta Wasiat Nomor 05 berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan terhadap Notaris ditinjau dari pertanggung jawaban notaris, Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dalam Pembatalan Akta Wasiat ditinjau dari teknik pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan, Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk Mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Akta Wasiat Nomor 05 Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan Terhadap Notaris ditinjau dari pertanggung jawaban notaris. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Dalam Pembatalan Akta Wasiat ditinjau dari teknik pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Notaris dalam membuat suatu akta otentik wajib memperhatikan, menerapkan serta memahami setiap prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan pembuatan akta wasiat dimana notaris tidak dapat membuat akta wasiat yang mewasiatkan atau hibah wasiatkan harta campur kedalam suatu perkawinan yang kepemilikan harta tersebut merupakan kepemilikan bersama, karena tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan pasangan kawin sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 903 Jo Pasal 966 KUHPer yang terdapat pada kasus putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN.Medan. Putusnya perkara tersebut berangkat pada kembalinya hak ahli waris yaitu istri, tiga anak kandung, dan anak angkat.

**Kata Kunci : Akta Wasiat, Akta Autentik, Peran Notaris**

**NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE CANCELLATION OF INHERITANCE  
RIGHTS DEED BASED ON COURT RULING NUMBER 43/PDT.G/2020/PN.MEDAN**

**(Study Decision Number: 43/PDT.G/2020/PN.MDN**

Zolla Mardhatillah (2120122036), Master of Notary, Andalas University, in 2024

***Abstract***

*In every transfer of marital property during the marriage, the act of transferring it is not agreed, pledging must obtain the consent of each married partner so that if there is a transfer of joint property during the marriage, the action will be null and void. The formulation of the problem in this research is: What are the legal consequences of canceling the Deed of Will Number 05 based on Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN.Medan on Notaries in terms of the notary's responsibility, What are the Legal Considerations in Cancelling a Deed of Will in terms of the technique of making a Notarial Deed? Based on Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN.Medan, the purpose of writing this thesis is to determine the legal consequences of canceling Will Deed Number 05 Based on Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN.Medan on Notaries in terms of the notary's responsibility. . To find out the legal considerations in canceling a will, look at the technique of making a notarial deed based on Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN.Medan. The method in this research is normative juridical. In making an authentic deed, a notary is obliged to pay attention to, apply and understand all the legal principles contained in Article 1868 of the Civil Code in relation to making a testamentary deed where a notary cannot make a testamentary deed that bequeaths or bequeaths mixed assets into a marriage. whose ownership of the property is joint ownership, because the action taken will harm the married couple so it can be categorized as an unlawful act as in Article 903 in conjunction with Article 966 of the Civil Code contained in decision case Number 43/PDT.G/2020/PN.Medan . The resolution of the case was based on the return of the rights of the heirs, namely the wife, three biological children and adopted children.*

**Keywords:** *Deed of Will, Authentic Deed, Role of Notary*